

Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Serba Usaha Pkk Di Handil

Adinda Ranandhea¹, LCA Robin Jonathan² dan Andi Indrawati³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : Ranandhea@gmail.com

Keywords :

*Financial Statements,
Financial Accounting, Small
and Medium Businesses.*

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of this Cooperative Financial Report is the Standard SAK ETAP Cooperative Bina Bersama (KSU) in collaboration with PKK. This study uses a quantitative descriptive analysis method, namely by collecting and describing data in the field, then classified, analyzed, and then interpreted so that it can provide a clear picture of the conditions under study to draw general generalization conclusions. This study aims to determine the implementation of SAK ETAP in Multipurpose Cooperatives (KSU) in collaboration with PKK. The benefit of this research is to assist Cooperatives in implementing Financial Accounting Standards for Entities Without Accountability. The results of this study conclude that the application of the financial statements of KSU Bina Bersama PKK is not fully in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP). and the absence of cash flow reports and reports of changes in equity in the KSU Financial Development Collective PKK report.

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjelaskan bagaimana penyajian laporan keuangan serta komponen-komponen apa saja yang harus dicantumkan dalam masing-masing laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengesahkan SAK ETAP yang lebih sederhana dibandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.1 tentang penyajian laporan keuangan. Beberapa komponen PSAK yang dihilangkan dalam SAK ETAP antara lain: pembuatan laporan keuangan konsolidasi, laporan arus kas badan usaha hanya menggunakan metode tidak langsung, sedangkan PSAK memberikan pilihan berupa metode langsung dan tidak langsung.

Menurut SAK ETAP (2009:1) Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik, namun entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

SAK ETAP diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2011 namun penerapan diperbolehkan lebih awal mulai 1 Januari 2010. Dengan adanya SAK ETAP ini, maka badan usaha seperti koperasi dapat menyajikan informasi yang relevan kepada para pengguna laporan keuangannya, baik internal maupun eksternal.

Laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Bersama PKK yang bergerak dibidang waserda dan koperasi simpan pinjam meliputi laporan laba rugi, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Diharapkan laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi ke pihak-pihak internal maupun eksternal yang membutuhkan.

Akuntansi keuangan merupakan suatu sistem yang memberikan informasi keuangan, menyusun laporan, menyiapkan laporan tentang pencatatan transaksi – transaksi keuangan bagi perusahaan. Dilihat dari segi fokus informasi, akuntansi keuangan berfokus pada suatu bentuk pertanggungjawaban dana yang sebelumnya dipercayakan oleh para penyedia dana dari pihak perusahaan kepada suatu manajemen perusahaan.

Laporan Keuangan Menurut Farid dan Siswanto (2011:2) Laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial”. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan dan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Koperasi Menurut Fay dalam Hendrojogi (2012:20) : Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri dari atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) telah dilakukan dalam laporan keuangan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Bersama PKK.
2. Mengetahui fungsi penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Bersama PKK.

METODE

Definisi Operasional Penelitian

Gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka akan diuraikan terlebih dahulu definisi operasionalnya.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Bersama PKK yang beralokasi di handil merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan waserda.

Laporan keuangan menurut perusahaan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan.

Menguji secara empiris apakah implementasi SAK ETAP berpengaruh pada laporan keuangan KSU Bina Bersama PKK. Dengan menggunakan metode komparatif antara laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dengan laporan keuangan menurut perusahaan maka nantinya peneliti akan mendeskriptifkan hasilnya menggunakan tabel komparatif tersebut. Dalam penelitian ini penulis meneliti setiap akun yang ada dalam laporan keuangan KSU Bina Bersama PKK untuk di sesuaikan dengan Standar Akuntansi yaitu SAK ETAP.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010:401) : “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

- a. Angket (Kusioner)

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab.

- b. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data - data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka, membaca, dan mempelajari berbagai macam *Literature* yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis guna melengkapi dan menunjang data yang diperoleh serta menganalisisnya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan dan menguraikan data yang ada dilapangan, kemudian diklasifikasikan, dianalisa, dan selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk menarik kesimpulan generalisasi yang bersifat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Membandingkan laporan keuangan KSU Bina Bersama PKK dengan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
2. Penyajian laporan keuangan sebelum dan sesudah SAK ETAP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Neraca

Neraca Koperasi Serba Usaha Bina Bersama PKK terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. SAK ETAP mensyaratkan pospos minimal yang perlu pada neraca tabel 1.

Tabel 1. Checklist Pos-Pos Neraca Pada KSU Bina Bersama PKK

No.	Pos Pada Neraca	Ada/Tidak
1	Kas dan Setara kas	Ada
2	Piutang usaha dan Piutang Lainnya	Ada
3	Persediaan	Ada
4	Properti Investasi	Tidak Ada
5	Aset Tetap	Ada
6	Aset Tidak Berwujud	Tidak Ada
7	Utang Usaha dan Utang Lainnya	Ada
8	Kewajiban Pajak	Tidak Ada

9	Kewajiban diestimasi	Tidak Ada
10	Ekuitas	Ada

Sumber : data hasil olahan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Koperasi Serba Usaha Bina Bersama PKK sudah mencantumkan 6 dari 10 pos-pos minimal yang harus ada dalam neraca berdasarkan syarat yang berlaku pada SAK ETAP.

Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Informasi perhitungan sisa hasil usaha berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Serba Usaha Bina Bersama PKK disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Checklist Pos-Pos Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada KSU Bina Bersama PKK

No.	Pos Pada Laba Rugi	Ada/Tidak
1	Pendapatan	Ada
2	Beban Keuangan	Ada
3	Bagian laba/rugi investasi yang menggunakan metode ekuitas	Tidak Ada
4	Beban pajak	Tidak Ada
5	Laba atau rugi neto	Ada

Sumber : data hasil olahan

Dari tabel diatas laporan Laba Rugi Koperasi Serba Usaha Bina Bersama PKK mencantumkan 3 dari 5 pos-pos minimal yang harus ada dalam laporan laba rugi berdasarkan syarat yang berlaku pada SAK ETAP.

Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas berdasarkan SAK ETAP pada KSU Bina Bersama PKK dimuat dalam tabel 3.

Tabel 3. Checklist Informasi Laporan Perubahan ekuitas KSU Bina Bersama PKK

No.	Informasi laporan perubahan ekuitas	Ada/Tidak
1	Laba atau rugi untuk periode	Tidak Ada
2	Pendapatan atau beban yang diakui langsung dalam ekuitas	Tidak Ada
3	Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui	Tidak Ada
4	Rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode	Tidak Ada

Sumber: data hasil olahan

Dari tabel diatas laporan Perubahan Ekuitas Koperasi Serba Usaha Bina Bersama PKK tidak menyajikan informasi dalam laporan perubahan ekuitas berdasarkan syarat yang berlaku pada SAK ETAP.

**Tabel 4. Neraca Koperasi Bina Bersama PKK
Per 31 Desember 2016**

Aset	2016	Kewajiban dan Ekuitas	2016
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas	Rp. 3.537.400	Utang Usaha	Rp. 20.000.000
Bank	Rp. 3.389.200	Simpanan Sukarela	Rp. 37.587.600
Aset	2016	Kewajiban dan Ekuitas	2016
Piutang Usaha	Rp. 127.295.350	Utang Pihak Ketiga	Rp. 178.000.000
Penyisihan Piutang tak Tertagih	Rp. (462.100)	Utang Pajak	Rp. 1.801.168
Piutang Simpan Pinjam	Rp. 298.970.000		
Penyisihan Piutang tak Tertagih – Simpan Pinjam	Rp. (2.385.000)		
Persediaan Barang	Rp. 75.648.000		
Jumlah Aset Lancar	Rp. 505.992.850	Jumlah Kewajiban	Rp. 237.388.768
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap			
Inventaris	Rp. 30.920.000		
Akm. Penyusutan Inventaris	Rp. (25.499.695)		
		Ekuitas	
		Modal	Rp. 153.425.450
		Simpanan Pokok	Rp. 6.400.000
		Simpanan Wajib	Rp. 4.490.000
		Hibah Total E&P Indonesia	Rp. 50.000.000
		Hibah Disperindakop	Rp. 50.000.000
		Cadangan Koperasi	Rp. 9.059.000
		SHU Tahun Berjalan	Rp. 649.937
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp. 5.420.305	Jumlah Ekuitas	Rp. 274.024.387
Jumlah Aset	Rp. 511.413.155	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp. 511.413.155

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4 diatas, akan dijelaskan perhitungan pajak terutang KSU Bina Bersama PKK tahun 2016 (hanya menghitung satu periode akuntansi saja) sesuai dengan PPRI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pasal 3 dan PPh Pasal 4 ayat (2) final dimana Koperasi dengan omzet kurang dari Rp. 4,8 Miliar dalam setahun maka dikenakan tarif 1% dari omzet. Pajak terutang pada tahun 2016 masuk dalam pos akun kewajiban jangka pendek dalam neraca.

Pajak terutang tahun 2016:

Penjualan bruto tahun 2016 = Rp. 180.116.750,-

Penghasilan kena pajak = Rp. 180.116.750,- x 1%

Pajak terutang tahun 2016 = Rp. 1.801.168,- (Pembulatan)

Berdasarkan kasus tersebut maka peneliti membuat Jurnal Penyesuaian untuk hutang pajak tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Beban Pajak Rp. 1.801.168,-

Hutang Pajak Rp. 1.801.168,-

(Jurnal penyesuaian untuk hutang pajak).

**Tabel 5. Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Bina Bersama PKK
Per 31 Desember 2016**

Uraian	31 Des 2016 (Rp)	
Pendapatan		
Penjualan Bruto Anggota	Rp. 126.889.250	
Beban Pokok Penjualan Anggota	Rp. (111.988.850)	
Total Pendapatan Neto Waserda Anggota		Rp. 14.900.400
Pendapatan bunga simpan pinjam anggota	Rp. 53.227.500	
Total pendapatan neto simpan pinjam anggota		Rp. 53.227.500
Pelayanan Neto Anggota (a)		Rp. 68.127.900
Pendapatan dari non Anggota		
Penjualan pada non Anggota	Rp. -	
Beban Pokok penjualan non Anggota	Rp. -	
Laba / Rugi Non Anggota (b)		Rp. -
Total pendapatan / SHU Kotor (a+b)		Rp. 68.127.900
Beban operasional		
Beban usaha	Rp. -	
Beban adminstrasi dan umum	Rp. 38.722.412	
Beban perkoperasian	Rp. 1.750.000	
Total beban operasional (c)		Rp. (40.472.412)
Uraian	31 Des 2016 (Rp)	
SHU Operasional ((a+b)-c)		Rp. 27.655.488
Pendapatan beban dan lain-lain		
Pendapatan lain	Rp. -	
Beban lain	Rp. -	
Total pendapatan dan beban lain		
SHU sebelum pajak		Rp. 27.655.488
Pajak penghasilan		Rp. (1.801.168)
SHU setelah pajak		Rp. 25.854.320
Koreksi Ekuitas	Rp. 25.204.383	
		Rp. (25.204.383)
SHU Tahun Berjalan		Rp. 649.937

Sumber: Data diolah, 2018

**Tabel 6. Laporan Perubahan Ekuitas Koperasi Bina Bersama PKK
Per 31 Desember 2016**

	Modal	Simpanan pokok	Simpanan Wajib	Hibah	Cadangan	SHU Belum Dibagikan	Total
Saldo Awal	Rp. 124.918.300	Rp. 7.000.000	Rp. 15.660.000	Rp. 100.000.000	Rp. 4.496.500	Rp. 12.847.150	Rp. 264.921.950
Penambahan	Rp. 28.507.150	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 4.562.500	Rp. -	Rp. 33.069.650
Pengurangan	Rp. -	Rp. (600.000)	Rp. (11.170.000)	Rp. -	Rp. -	Rp. (12.197.213)	Rp. (23.967.213)
Saldo Akhir	Rp. 153.425.450	Rp. 6.400.000	Rp. 4.490.000	Rp. 100.000.000	Rp. 9.059.000	Rp. 649.937	Rp. 274.024.387

Sumber: Data diolah, 2018

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara penyajian laporan keuangan KSU Bina Bersama PKK dengan SAK ETAP. Hal ini dapat dilihat dimana pada neraca KSU Bina Bersama tidak mencantumkan hutang pajak dalam kewajiban jangka pendek nya dan pada perhitungan hasil usaha adanya kesalahan pencatatan nominal pada beban penyusutan dimana koperasi mencatat beban penyusutan sebesar akumulasi penyusutannya dan adanya kesalahan yang terjadi pada perhitungan total keseluruhan akumulasi penyusutan aset tetap, penyajian beban operasional yang tidak dipisahkan sesuai dengan golongannya, dan koperasi belum menerapkan perhitungan pajak penghasilan sehingga koperasi tidak menyajikan pajak penghasilan di dalam laporan perhitungan hasil usahanya, serta catatan atas laporan keuangan yang disajikan KSU Bina Bersama hanya menjelaskan pos-pos yang ada pada Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha saja tidak selengkap yang disyaratkan oleh SAK ETAP.

Ketidaksesuaian selanjutnya, KSU Bina Bersama PKK hanya menyajikan neraca, perhitungan sisa hasil usaha, dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangannya. KSU Bina Bersama PKK tidak menyajikan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh SAK ETAP. Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dikarenakan adanya ketidaksesuaian pada laporan KSU Bina Bersama PKK menurut SAK ETAP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada koperasi serba usaha PKK dihandil. Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang telah dilakukan dapat kesimpulan bahwa:

1. Neraca yang dibuat koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Bersama PKK belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP karena tidak menyajikan hutang pajak pada neraca, sehingga menyebabkan laporan neraca yang dibuat oleh KSU Bina Bersama PKK belum akurat.
2. Perhitungan Hasil Usaha yang dibuat koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Bersama PKK juga belum sepenuhnya sesuai SAK ETAP karena adanya kesalahan pencatatan nominal pada beban penyusutan dimana koperasi mencatat beban penyusutan sebesar akumulasi penyusutannya dan adanya kesalahan yang terjadi pada perhitungan total keseluruhan akumulasi penyusutan aset tetap, penyajian beban operasional yang tidak dipisahkan sesuai dengan golongannya, dan koperasi belum menerapkan perhitungan pajak penghasilan sehingga koperasi tidak menyajikan pajak penghasilan di dalam laporan perhitungan hasil usahanya.
3. Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan belum sesuai yang disyaratkan dalam SAK ETAP karena koperasi hanya menjelaskan pos-pos yang ada pada neraca dan perhitungan hasil usaha saja, seharusnya catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang lebih rinci tentang detail yang ada dalam laporan keuangan sehingga meningkatkan transparansi laporan keuangan koperasi dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan koperasi.
4. Tidak disajikannya laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang disyaratkan SAK ETAP.

Saran

Saran yang dapat diberikan terkait hasil yang diperoleh pada penelitian tentang implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada koperasi serba usaha PKK dihandil adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Bersama PKK hendaknya lebih teliti dalam membuat laporan keuangannya, karena didalam laporan keuangan yang dibuat oleh KSU Bina Bersama PKK masih ditemukan ketidak telitian dalam penyajiannya.
2. Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Bersama PKK dalam menyajikan laporan keuangan sebaiknya lebih tanggap pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan koperasi, seperti peraturan mengenai pedoman umum akuntansi koperasi agar informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut menjadi lebih lengkap, akurat, serta andal sehingga pihak intern koperasi yaitu pengurus, badan pemeriksa, dan anggota maupun pihak ekstern yakni bank baik sebagai kreditur, kanwil koperasi, kantor pajak, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan laporan keuangan koperasi dapat dengan mudah memahami laporan keuangan tersebut.
3. Koperasi sebaiknya melakukan kewajiban pajak yang telah ditentukan.
4. Laporan keuangan yang telah dibuat peneliti berdasarkan SAK ETAP agar segera diimplementasikan pada pelaporan keuangan usaha koperasi selanjutnya, serta konsisten dalam penggunaan laporan keuangan sesuai SAK ETAP.

REFERENCES

- Auliyah, Iim Ma'rifatul. 2012. Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Kampung Batik Di Sidoarjo. STIE Perbanas Surabaya.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Farid dan Siswanto. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Fees, Warren, Reeve. 2008 . Pengantar Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta.
- Hans Kartikahadi., dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Hendrojogi. 2012. Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Martani, D. 2011. *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)*. Riau.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.

